

MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN MEMADAI

Negara bertekad memberi perlindungan sosial sepanjang hayat bagi masyarakat. Layanan kesehatan tanpa diskriminasi dibangun sebagai pondasi. Penyesuaian iuran diterapkan demi kesinambungan program penuh manfaat.



Daftar Isi



COVER STORY:

Masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan sosial dari negara. Salah satunya terwujud dalam program pelayanan kesehatan bernama JKN-KIS. Perlindungan tersebut kami analogikan dengan perlengkapan pemain hoki yang mampu melindungi mereka dari risiko cedera.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistyio. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwodidu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

LAPORAN UTAMA

- 8 Khitah Penyesuaian, Jaga Keberlanjutan.
- 12 Menghelat Program Kaya Manfaat
- 16 Infografis
- 18 Memintal Jaring Pengaman Kesehatan
- 20 Perkuat Ekosistem Untuk Indonesia Sehat

PHOTO STORY

- 22 Jewelry of Jogja

TEKA TEKI

- 22 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Asa di Ibu Kota Baru

POTRET KANTOR

- 28 Transformasi Wali Transaksi Luar Negeri

BAGAIMANA CARANYA?

- 40 Membuat NPWP Secara Online

FIGUR

- 32 Mengelola Manusia Dari Hati

BUKU

- 35 Gagal Paham

OPINI

- 36 Laporan Belanja Perpajakan untuk Transparansi Fiskal dan Evaluasi Insentif

UANG KITA BUAT APA

- 38 Liuk Elok Kelok 9

OPINI

- 46 Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

GENERASI EMAS

- 48 Optimalkan Kesempatan, Lahirkan Inovasi

LOKAL

- 54 Arti Tersembunyi Koreografi Tari Caci

FINANSIAL

- 56 Marry with Your Bank

GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN

Jaminan Kesehatan Berkelanjutan

#temantransparansimu

Menjelang berakhirnya tahun 2019, banyak polemik yang muncul di ruang publik terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang diterapkan mulai Januari 2020. BPJS Kesehatan sendiri merupakan wujud dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dipilih oleh pemerintah dan DPR untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan biaya yang terjangkau atau biasa disebut *Universal Health Coverage* (UHC).

Program JKN adalah program strategis jika dilihat dari jumlah masyarakat yang dijangkau, jenis layanan kesehatan yang diberikan, serta bantuan biaya yang diberikan pemerintah. Untuk layanan kesehatan, program JKN memberikan jaminan atas seluruh jenis

penyakit sepanjang terdapat indikasi medis. Selain itu, sebagai program jaminan sosial, BPJS Kesehatan juga menerima seluruh warga negara menjadi peserta tanpa dilakukan berbagai jenis tes atau *screening* sebagaimana layaknya persyaratan mengikuti program asuransi yang dikelola oleh swasta. Layanan kesehatan yang diberikan juga meningkat setiap tahunnya.

Dari sisi biaya, program JKN relatif sangat murah. Iuran kelas III program ini hanya dikenakan biaya per orang per bulan sebesar Rp42.000,- Dengan iuran sebesar ini, BPJS Kesehatan sebenarnya merupakan salah satu program jaminan kesehatan dengan iuran yang paling murah di dunia.

Oleh karena itu, saat akan menyesuaikan iuran di tahun 2020 ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama yaitu kemampuan peserta dalam membayar iuran, upaya memperbaiki

keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain (subsidi silang). Dengan demikian pemerintah sangat perhatian agar menyesuaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan.

Pemerintah menyadari sepenuhnya masih banyak tantangan dan kendala untuk pelaksanaan program JKN ini. Namun semangat untuk memperbaiki dan meningkatkan program JKN akan selalu ada dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Gotong royong juga timbul dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi



Majalah Media Keuangan
@majalahmediakeuangan

Menurut Anda, dari 10 Komitmen Perbaikan Layanan Jaminan Kesehatan oleh BPJS, mana yang perlu diprioritaskan?

@Nuelpac
Perluasan RS dengan sistem antrian pasien elektronik. Karena kasihan pasien nunggu lama dari pagi sampai siang atau sore.

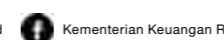
@melaniii19_
Perluasan RS dengan fitur *disiplau tempat tidur rawat inap*. Agar terjaminnya transparansi pelayanan BPJS kepada masyarakat dan menghindari diskriminasi pelayanan BPJS dan Non BPJS.

@cemiit
Kemudahan dan percepatan layanan informasi. Ketepatan pelayanan poin penting dalam menolong dan memberikan kepercayaan kepada pasien terhadap BPJS. dg mudah.

Unduh Mobile PPID, dapatkan kemudahan Informasi terkait Kementerian Keuangan



www.kemenkeu.go.id



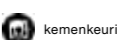
Kementerian Keuangan RI



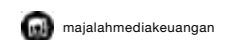
@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan

Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sedang melakukan inventarisasi dan penilaian aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di pulau Pabelokan Kepulauan Seribu. Pulau ini dijadikan *basecamp* pangkalan minyak lepas pantai yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi dilepas pantai Laut Jawa sekitar 90 km sebelah utara Teluk Jakarta, Indonesia.

Tatkala Segara Dinilai Negara



Perbaikan sistem rujukan juga perlu dibenahi melalui penguatan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya.

Foto Resha Aditya

Khिताh Penyesuaian, Demi Jaga Keberlanjutan.

Teks Dara Haspramudilla

Kesehatan sejatinya adalah hak asasi manusia, kebutuhan manusia paling mendasar selain pangan, sandang dan papan. Sebab, hanya dalam keadaan sehatlah manusia dapat menikmati ketiganya. Kondisi sehat juga diperlukan untuk hidup, tumbuh dan produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Itulah sebabnya kesehatan menjadi satu dari tiga indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia bersanding dengan pendidikan dan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, perlindungan kesehatan merupakan amanat konstitusi. Termaktub dalam pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itulah sebabnya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin persamaan akses kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah ikhtiar pemerintah untuk memenuhi cita-cita akan hadirnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Berjalan lebih dari lima tahun, program JKN-KIS bukanlah tanpa cela. Sejauh ini JKN-KIS berjalan baik namun masih ada sejumlah catatan yang perlu dituntaskan.

Defisit kerap membayangi, menjadi perintang untuk penyediaan layanan kesehatan yang mumpuni. Program ini pun dicap tidak bagus karena defisit terus-menerus. Ada tiga opsi yang ditawarkan sebagai solusi yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan suntikan dana tambahan.

Penyesuaian iuran tak terelakkan
 Dari tahun ke tahun, suntikan dana konsisten diberikan pemerintah sebagai penyambung hidup BPJS Kesehatan. Kini saatnya beralih pilihan, penyesuaian iuran program JKN-KIS pun tak terhindarkan.
 Hasbullah Thabrany, Chairman The Indonesian Health Economics Association,

Belanja Kesehatan di beberapa negara per kapita PPP (dalam US\$)

Vietnam

356,28

Thailand

635,02

Kamboja

228,57

Tiongkok

761,49

Singapura

4083,75

Filipina

342,29

India

241,48

Indonesia

362,72

Myanmar

291,09

mengatakan bahwa penyesuaian iuran JKN-KIS ini terlambat. Namun demikian, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menaikkan iuran JKN-KIS.

“Saya appreciate Menteri Keuangan sudah bagus mau menaikkan. Selanjutnya tinggal konsistensi kita mengejar ketertinggalan dengan berani menaikkan iuran sebesar 30 persen per tahun. Dengan demikian baru kita bisa menyediakan layanan kesehatan yang memadai,” terangnya.

Hal senada juga diungkap Tubagus Achmad Choesni, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dari hasil kajian dan rekomendasi DJSN ke Presiden bahwa kenaikan iuran memang harus ditinjau ulang karena terakhir dinaikkan pada 2016.

“Setelah dikaji ternyata *cost per member per month* (CPCM) jauh di atas premi yang kita kenakan. Ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan program JKN-KIS. DJSN melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi terkait iuran dan untuk memastikan perhitungan kami juga mengundang Ikatan Aktuaris Indonesia (IAI),” tutur Choesni.

Menanggapi soal nominal yang lebih tinggi dari usulan DJSN, Iene Muliati, Anggota DJSN memahami pendekatan Kementerian Keuangan. “Jadi defisitnya mari kita selesaikan sehingga nanti kalau kenaikan iuran itu nanti hanya tinggal yang sistemiknya, yang operasionalnya tapi secara finansialnya sudah ditutup,” tuturnya.

Choesni juga menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan arus kas untuk membayar fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit.

“Jika kita bisa memberikan *cashflow* secepatnya, rumah sakit juga bisa meningkatkan perbaikan karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja sistem dan pelayanan ke peserta,” tambahnya

Meski demikian, sudut pandang berbeda diungkapkan Liliek, Direktur

Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK). Pihak rumah sakit merasa khawatir penyesuaian iuran ini akan berdampak pada arus kas mereka.

Solusi lain ditawarkan Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Menurutnya sebelum menaikkan iuran sebaiknya perlu ada pembagian yang proporsional antara Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Peserta Mandiri.

“Semestinya proporsi PBI diperkecil dulu. Tingkat kemiskinan kita kan 10 persen, mengapa PBI angkanya 60 persen? Kalaupun pemerintah menanggung yang levelnya di atas *poverty rate* mungkin saja lebih besar dari 10 persen tapi tidak sampai 50 persen. Perkiraan saya hanya 40 persen dan itu angka ideal untuk PBI,” terangnya.

Tata Kelola dan Rujukan Menjadi Sorotan

Presiden Joko Widodo sempat melontarkan bahwa salah satu penyebab defisit terdapat pada kelemahan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan terutama terkait iuran peserta mandiri. Selain itu, obral rujukan yang dilakukan oknum penyedia jasa kesehatan juga menjadi sorotan.

Menanggapi kedua hal tersebut, Choesni menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya *moral hazard* yang terjadi selama lima tahun penyelenggaraan program JKN-KIS.

“Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah ketika terjadi misalnya tindakan C-section tanpa ada indikasi medis. Jadi misalnya hanya ingin C-section karena tanggal cantik begitu. Dalam kasus seperti ini pasien dan *obgyn* diuntungkan sementara pihak yang dirugikan hanya BPJS kesehatan,” ucapnya.

Perspektif berbeda diutarakan Hasbullah, menurutnya mayoritas pejabat pemerintah masih terjebak pada angka-angka yang keliru. Ia



Perbaikan sistem rujukan juga perlu dibenahi melalui penguatan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya.

Foto Resha Aditya

mencontohkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai angka operasi caesar yang sebesar 45 persen. Kekeliruan ini terjadi sebab denominator yang dihitung hanyalah yang ada di klaim BPJS sementara yang dihitung seharusnya denominator semua persalinan.

“Saya sudah cek klaim di BPJS seluruh persalinan cuma 1,2 juta setahun, padahal jumlah persalinan yang ada di Indonesia seluruhnya dari tahun ke tahun variannya 5,2 sampai 5,4 juta, jadi nggak sampai 20%. Jadi, kalau mau benar pakailah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), di situ tertera hanya 17 persen”, ujarnya.

Saran Perbaikan dan Harapan

Setelah penyesuaian iuran, komitmen selanjutnya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dan meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan.

“Kepentingan kita adalah membuat JKN-KIS itu *sustain*

dan bisa meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan”, ujar Choesni.

Faisal menyarankan perlu adanya segmentasi kelas baru yakni premium. Hal ini disebabkan sangat timpangnya struktur pendapatan masyarakat Indonesia sementara segmentasi kelas BPJS belum merepresentasikan preferensi tingkat pendapatan masyarakat

“Ada lapisan masyarakat yang tidak masalah iuran naik asal pelayanan bagus. Jadi seandainya dia di kelas 1 tapi fasilitas pelayanan sama, antrinya sama panjangnya pasti akan merasa tidak *worth it*,” jelasnya.

Senada dengan Faisal, Iene tidak menampik adanya fenomena peserta yang tidak ingin turun kelas tetapi ingin agar layanannya diperbaiki. Selain itu, Iene juga mengatakan perbaikan sistem rujukan juga perlu dibenahi melalui penguatan di tingkat Puskesmas.

“Kita mendorong regulasi Kemenkes untuk menguatkan Puskesmas sehingga bisa

menanggulangi penyakit-penyakit yang sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit”, ungkapnya.

Sementara itu, Hasbullah menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap besaran anggaran belanja kesehatan agar pelayanan fasilitas kesehatan kita dapat bersaing.

“Sebetulnya Undang-Undang Kesehatan sudah mengamanatkan minimal 5 persen dari APBN. Namun angka ini kemudian dipersepsi sebagai *ceiling* padahal itu *floor*”, ujarnya.

Belanja kesehatan publik nasional Indonesia terhadap GDP juga termasuk rendah dibandingkan Timor Leste, Thailand, Malaysia dan China.

“Indonesia hanya 1,4 persen sementara Timor Leste saja sudah 2,2 persen. China, Thailand, dan Malaysia sudah di atas 3 persen. Dulu kita setara China, sekarang tertinggal. Maka jangan heran jika sekarang banyak orang Indonesia berobat ke China sebab belanja kesehatannya tiga kali lipat dari kita. Jadi, lebih besar kemungkinan mereka memperbaiki sistem kesehatannya,” terangnya.

Terkait tolok ukur sistem JKN-KIS dengan negara lain, Choesni menyatakan, “Kalau saya bilang *best fit* ya. Jadi kita belajar *best practices* di lokalitas tertentu tapi kita kemudian kita *adapt* bukan *adopt*,” jelasnya.

Dengan demikian, tidak hanya sekedar melihat program terbaik di negara lain tapi juga dilihat kesesuaiannya dengan kondisi sosio-ekonomi dan demografis Indonesia.



Untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, perbaikan pada keseluruhan sistem mutlak diperlukan, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi

Foto
Gathot
Subroto

Menghelat Program Kaya Manfaat

Teks Reni Saptati D.I.

Besaran iuran yang *underpriced* menjadi sumber utama defisit yang tiap tahun membelit. Sejak awal, program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memang dirancang dengan iuran terjangkau. Banyak hal dipertimbangkan dalam penetapan iuran, mulai dari kemampuan masyarakat, kesinambungan program, hingga kelayakan manfaat. Namun, kian lama defisit kian melangit. Usai melalui proses panjang, opsi penyesuaian iuran dipilih demi keberlangsungan program kaya manfaat.

Disepakati seluruh pihak

Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah mengalami defisit sejak awal dioperasikan pada 2014. Tahun pertama, defisit mencapai Rp1,9 triliun. Tahun-tahun berikutnya, angka tersebut beranjak naik menyentuh Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Suminto mengakui kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan saat ini sangat memprihatinkan. “Akumulasi defisit pada program JKN tanpa adanya penyesuaian iuran diperkirakan terus meningkat signifikan, yaitu Rp32 triliun di 2019, Rp44 triliun di 2020, Rp56 triliun di 2021, dan Rp65 triliun di 2022,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pemerintah ini menjelaskan, selain iuran yang *underpriced*, penyebab utama defisit ialah *adverse selection* pada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Sebagian besar peserta mandiri mendaftar ketika sakit yang umumnya memerlukan layanan kesehatan berbiaya mahal, tetapi berhenti mengiur usai mendapatkan layanan.

“Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen,” kutip Suminto. Di samping kedua penyebab utama tersebut, ia

menyebut faktor lain seperti inefisiensi layanan, belum sempurnanya manajemen klaim, kejadian *moral hazard*, serta belum sempurnanya *strategic purchasing*.

Dukungan pendanaan dari APBN mengalir sejak awal program bergulir. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Purwanto menjelaskan pemerintah pusat mendanai pembayaran iuran bagian pemberi kerja ASN Pusat, bantuan iuran untuk masyarakat tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI), serta Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN dalam program JKN-KIS, terang Purwanto, diberikan sebesar Rp5 triliun (2015), Rp6,8 triliun (2016), sedangkan bantuan pemerintah digelontorkan sejumlah Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018). Namun, bantuan tersebut masih belum jua mampu menutup defisit.

Opsi penyesuaian iuran dipilih dan kini sudah resmi diberlakukan. Penyesuaian iuran berlaku mulai 1 Agustus 2019 untuk PBI dan 1 Oktober 2019 Pekerja Penerima Upah (PPU) dari ASN/TNI/Polri. Sementara itu, untuk PPU dari pegawai BUMN dan karyawan swasta serta peserta mandiri, penyesuaian iuran berlaku per 1 Januari 2020.

Suminto menegaskan, sebelum memutuskan menyesuaikan iuran, pemerintah telah mendengar dan melibatkan DPR RI, DJSN, BPJS Kesehatan,



“Seluruh pihak sepakat bahwa program JKN telah memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia dan wajib dipastikan keberlangsungannya ”

Suminto
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
Kementerian Keuangan

asosiasi terkait, serta kementerian terkait. “Seluruh pihak sepakat bahwa program JKN telah memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia dan wajib dipastikan keberlangsungannya,” tandasnya.

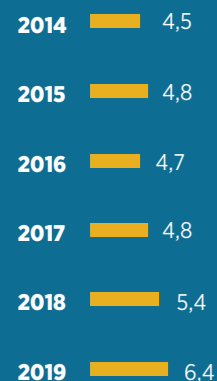
Mengantisipasi perpindahan kelas

Penyesuaian iuran berpotensi menimbulkan perpindahan kelas peserta mandiri. Mengantisipasi ini, pemerintah dan BPJS Kesehatan mengubah peraturan terkait kemudahan pindah kelas bagi peserta mandiri perorangan sebelum satu tahun.

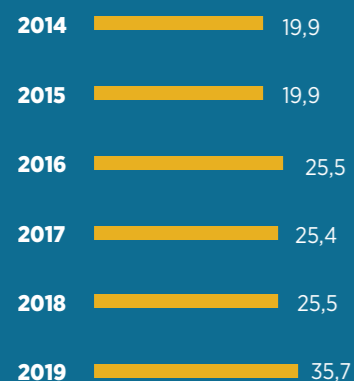
Namun demikian, Purwanto menilai perpindahan kelas dapat mengakibatkan penurunan target penerimaan iuran atau bahkan kembali menyebabkan defisit jika penurunan terus berlanjut. Oleh sebab itu, ia berharap BPJS Kesehatan menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan iuran

Dukungan Pendanaan Pemerintah dalam Program JKN-KIS

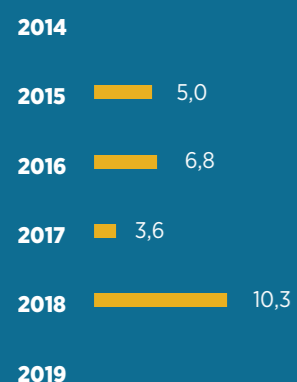
PPU Pemerintah Pusat



Bantuan iuran untuk PBI JKN



MN atau Bantuan Pemerintah



serta menegakkan kepatuhan pembayaran iuran. Di samping itu, ia menilai dukungan APBN dan APBN untuk penyediaan *supply side* layanan kesehatan perlu ditingkatkan.

Pengajuan perpindahan kepesertaan oleh masyarakat menjadi PBI diakui Purwanto memang dapat menambah anggaran pemerintah untuk iuran PBI. “Namun, sudah menjadi komitmen pemerintah untuk membiayai jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu,” tegasnya.

Dalam menghadapi perpindahan kelas, Kemensos berpedoman pada persyaratan yang berlaku serta melihat pembatasan kuota nasional PBI yaitu 96,8 juta jiwa. “Untuk menjadi peserta PBI, peserta harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang pengusulannya melalui mekanisme verifikasi dan validasi (*verivali*) data rumah tangga calon peserta melalui instrumen DTKS,” terang Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras. Hasil *verivali* dilakukan setiap tiga bulan sekali, sedangkan penetapan perubahan PBI dilakukan setiap satu bulan sekali.

Sementara itu, Suminto menggarisbawahi bahwa tidak hanya peserta kelas tiga saja yang dapat mengajukan pindah menjadi segmen PBI. “Seluruh penduduk Indonesia yang dapat dibuktikan tergolong sebagai orang miskin dan tidak mampu, dapat mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta penerima bantuan iuran,” ujarnya.

Cegah defisit berulang

Berbagai upaya mitigasi disiapkan pemerintah untuk mencegah defisit kembali terulang. Suminto mengungkapkan, dalam jangka pendek instansi terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPKP, khususnya rekomendasi perbaikan pada aspek kepesertaan dan penerimaan iuran, biaya manfaat jaminan kesehatan, dan *strategic purchasing*. Suminto berkata, “BPJS Kesehatan harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta mandiri.”

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menargetkan tingkat keaktifan peserta mandiri nantinya dapat mencapai 60 persen. “Belajar dari Korea, kira-kira 10 tahun lalu peserta aktif di sana pernah di angka 25 persen. Tapi mereka punya *enforcement*. Bisa menyita aset, bisa mengintip rekening orang,” cerita Fachmi.

Ia menerangkan BPJS Kesehatan sedang

mengembangkan cara untuk meningkatkan keaktifan peserta. Untuk tahap awal ini belum melalui *enforcement*, tetapi masih berupa penerapan prasyarat pada layanan publik. “Misalnya, tiap kali orang mau memperpanjang paspor, ada informasi bahwa dia belum bayar iuran. Minimal ada *awareness* dan dia tahu negara tahu.”

Untuk validasi dan pemutakhiran data, khususnya data PBI, BPJS Kesehatan memerlukan peran Kemensos. Untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial ini, Hartono Laras mengatakan pihaknya menyediakan sistem aplikasi untuk meng-*update* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG). Selain itu, Kementerian Sosial juga menyediakan anggaran untuk pengadaan jaringan komunikasi di 514 kabupaten/kota.

Untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, perbaikan pada keseluruhan sistem mutlak diperlukan, termasuk di dalamnya langkah penyesuaian iuran. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani berharap penyesuaian iuran dapat membantu mengatasi kesulitan finansial pada program JKN-KIS sehingga memberi efek domino yang positif. “BPJS Kesehatan bisa membayar ke fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan pun tidak terganggu lagi *cashflow*-nya, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” pungkas Kalsum.

Sampaikan **LP2P** dan/atau **LHK** periodik tahun 2019 melalui



alpha.kemenkeu.go.id

paling lambat **31 Maret 2020**



Komitmen Peningkatan Layanan Kesehatan

Pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian iuran layanan kesehatan demi menjaga kesinambungan. Lalu apa saja komitmen yang ditawarkan demi meningkatkan pelayanan kesehatan?

Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2019



PBI APBN
96.516.666



PBI APBD
38.842.476



PPU PN
17.621.446



PPU BU
35.907.690

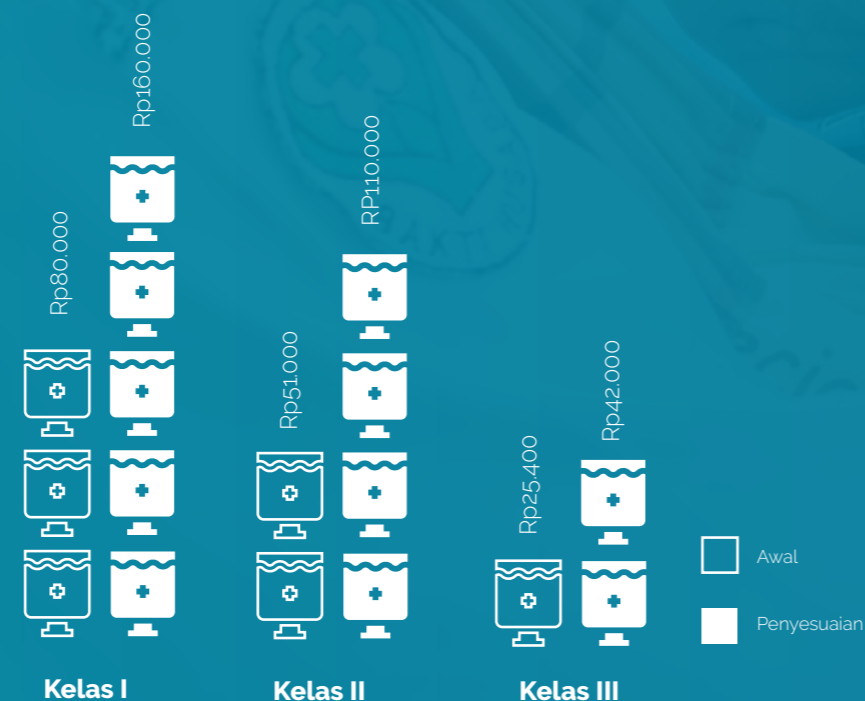


PBPB Pekerja Mandiri
30.248.656



Bukan Pekerja
5.012.085

Penyesuaian Tarif Layanan BPJS per 1 Januari 2020



Perjalanan Panjang Perbaikan Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat

10 Komitmen perbaikan layanan jaminan kesehatan oleh BPJS

1968

Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dibentuk



BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) Optimalisasi peran petugas penanganan pengaduan peserta RS



Perluasan RS dengan display ketersediaan tempat tidur rawat inap

1984

BPDPK beralih status menjadi BUMN dengan nama Perum Husada Bhakti (PHB)



Program PRAKTIS (Perubahan Kelas Tidak Sulit) Kemudahan pindah kelas perawatan



Integrasi sistem informasi FKTP dan FKRTL dengan Mobile JKN (antrian, rujukan, riwayat pelayanan)

1992

PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero)



BPJS Kesehatan Jemput Bola, Peningkatan dan perluasan layanan Mobile Customer Services.



Display RS untuk waiting list tindakan operasi

2005

PT Askes melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.



Penyederhanaan prosedur layanan hemodialisa (HD)



Kemudahan dan percepatan layanan administrasi

2014

PT Askes beralih menjadi BPJS sejak penunjukan PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan.



Perluasan RS dengan sistem antrian pasien elektronik



Penambahan fitur IVR (mesin penjawab elektronik) melalui Care Center

Penyesuaian iuran JKN-KIS diharapkan mampu mengobati BPJS yang sedang sakit

Foto
Fath

Memintal Jaring Pengaman Kesehatan

Teks Dimach Putra

Sari menerawang, mengingat-ingat masa-masa terberat dalam hidupnya. Tahun 2018 lalu ia melahirkan anak ketiganya. Namun kebahagiaannya saat itu harus dibayangi dengan ketakutan terbesar tiap orang tua. Buah hati yang baru dilahirkannya divonis dokter mengidap *perimembranous outlet-ventricular septal defect* (PMO-VSD). Sebuah kelainan bawaan di mana terdapat kebocoran pada bilik jantung buah hatinya. Sedih berkepanjangan bukan pilihan bagi ibu tiga anak ini. Ia harus tegar menemani peri kecilnya, Xera, menjalani serangkaian tindakan medik yang telah dipetakan oleh tim dokter.

Mengharap perbaikan

Sebagai pegawai swasta, Sari memang memiliki paket asuransi yang baik dari kantornya. Sayangnya seperti kebanyakan asuransi swasta lain, penyakit bawaan lahir bukan termasuk ke dalam daftar penyakit yang dapat ditanggung oleh penyedia asuransi. Namun ia tidak berkecil hati. Beruntung baginya, pihak kantor juga mewajibkan seluruh pegawainya untuk mendaftar BPJS Kesehatan.

"Bersyukur banget, karena tanggungan BPJS itu kan luas banget ya. Jadi anak saya langsung saya *bikinin*," ungkap Sari. Seperti pasien BPJS lainnya, Sari harus bersabar mengikuti alur rujukan dari fasilitas kesehatan (Faskes) I, Faskes II hingga mendapat rujukan di Faskes III. Rangkaian pengurusan rujukan tersebut harus mulai dilakukannya saat Xera masih berusia empat bulan. Masalah antrian anggota BPJS di Faskes, meskipun sebelumnya telah disadari dan diantisipasi Sari, menjadi hal yang sering membuatnya mengelus dada.

"Itu sih yang saya agak sedih. Anak saya masih kecil banget dengan kondisi seperti itu harus ikut mengantri, sampai lemas dan dehidrasi dia," sesalnya. Sari pun berharap untuk antrian dan rujukan agar tercipta kondisi yang lebih manusiawi, terutama bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Ia juga menghendaki agar rentang masa berlaku surat rujukan kembali dibuat untuk enam bulan. "Ya terutama pasien yang penyakitnya itu-itu aja. Seperti Ibu saya, orang sepuh kan berobatnya rutin dan cenderung keluhan penyakit yang sama, kasihan kalau harus bolak-balik,"

tambahnya.

Sari menyadari bahwa kisahnya menggunakan BPJS merupakan *success story*. Ia pun tidak keberatan ketika akhirnya iuran BPJS disesuaikan mulai awal tahun 2020 ini. Bagi anggota yang sudah pernah merasakan manfaat langsung dari penggunaan BPJS, membayar iuran mungkin terasa lebih ringan dan masuk akal. Menurutnya, yang harus dipahami masyarakat adalah konsep iuran asuransi itu sendiri yaitu iuran tersebut dipakai jika mereka sakit. Ia pun menyayangkan sebagian masyarakat belum paham atas konsep ini.

Rakit penyelamat rumah sakit

Berbeda dengan pengguna layanan, penyesuaian iuran JKN-KIS membawa fenomena berbeda bagi rumah sakit sebagai pihak penyedia fasilitas kesehatan. Liliek Marhaendro Susilo, Direktur Keuangan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK), menawarkan saran yang menurutnya lebih *win-win* bagi semua pihak. "Bagaimana jika pasien BPJS tetap dikenakan 30 persen biaya pengobatannya?" ungkapnya mencontohkan.

Saran tersebut tentunya harus lebih dipandang dan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan di sektor lain secara holistik. Ia menyadari jika kemampuan membayar tiap peserta berbeda-beda. Menurutnya yang harus diprioritaskan adalah penetapan penerima bantuan iuran (PBI) secara tepat guna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Faktor kemampuan bayar ini pula yang menjadi *concern* rumah sakit sebagai pihak yang

harus menyediakan layanan fasilitas kesehatan. Dengan adanya kenaikan tarif, dikhawatirkan kemampuan bayar peserta juga akan menurun, entah berupa penurunan kelas maupun kepatuhan pembayaran iuran bulannya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada pembayaran klaim tindakan yang telah dilaksanakan fasilitas kesehatan kepada BPJS. "Saat ini saja banyak pasien yang ketika masuk baru diketahui menunggak iuran. Mereka harus menyelesaikan tanggungannya dulu sebelum mendapat pelayanan," urai Liliek. Ia menambahkan, "Tentu mereka memilih melunasi tunggakan iuran yang tidak seberapa, dibanding harus membayar tagihan pengobatan yang lebih besar."

Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSJPDHK memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan perannya sebagai puncak mata rantai penyedia fasilitas kesehatan JKN-KIS. Rumah sakit khusus ini berpotensi menerima rujukan berlebih di luar faktor pertimbangan keparahan penyakit dari rumah sakit lain yang berada di bawahnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, pihak RSJPDHK terus bekerja sama dengan rumah sakit lain dan juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar lebih memperketat pengawasan dan aturan terkait sistem rujukan tersebut.

Sebagai tindakan preventif, RSJPDHK rutin melakukan upaya pembinaan terhadap rumah sakit jejaringnya. Hal tersebut sejatinya merupakan amanah dari Kementerian Kesehatan bagi RSJPDHK sebagai rumah sakit pengampu. Upaya tersebut ibarat rakit penyelamat yang akan membantu rumah sakit. Dengan demikian, secara bertahap rumah sakit lain dengan kelas di bawahnya akan mampu menawarkan fasilitas pelayanan seperti yang ada di RSJPDHK untuk pasien dengan tingkat keparahan yang lebih rendah.

Terakhir Liliek menitip harap kepada BPJS Kesehatan agar sistem JKN-KIS yang ada terus dan akan bisa makin disempurnakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak harus saling mendengar keluhan masing-masing. Di level tertinggi sebagai pembuat kebijakan, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mensimplifikasi peraturan agar tidak saling tumpang tindih sehingga memperkecil kesempatan adanya *fraud* ataupun salah tafsir.

Perkuat Ekosistem Untuk Indonesia Sehat

Teks CS. Purwodidhu

Fachmi Idris,
Dirut BPJS
Kesehatan

Foto
Fath



Lima tahun sudah program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan. Di balik defisit yang terjadi setiap tahunnya, pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat tetap harus berjalan. Bukan semata amanah Undang-Undang, tetapi pada dasarnya menjadi sehat adalah hak asasi manusia. Segala upaya dilakukan pemerintah mulai dari memberikan suntikan dana hingga penyesuaian iuran JKN-KIS yang diberlakukan di awal tahun 2020. Simak petikan wawancara Media Keuangan bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Fachmi Idris, seputar keberlangsungan JKN-KIS.

Apa yang melatarbelakangi terjadinya defisit JKN-KIS?

Konstruksi iuran JKN-KIS pada awalnya memakai asumsi minimum guna menjaga keberlangsungan kapasitas fiskal. Regulasi kemudian mengatur bahwa setiap tahun program ini harus mampu membiayai kewajiban yang ditanggungnya. Permasalahannya adalah memang terjadi ketidakseimbangan (*mismatch*) antara total pendapatan dan total pengeluaran. Akan tetapi dalam konteks program, setiap tahun kewajiban membayar ke fasilitas kesehatan selalu terpenuhi.

Opsi kebijakan apa saja untuk memitigasi kondisi keuangan yang tidak seimbang tersebut?

Terdapat tiga opsi, yaitu penyesuaian iuran, perasionalan manfaat, atau suntikan dana tambahan. Dengan

berbagai pertimbangan, akhirnya opsi ketiga yakni menyuntikkan dana tambahan dipilih pemerintah untuk mengatasi *mismatch* yang terjadi. Di akhir tahun 2018, dilakukan audit tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan sistem populasi ke seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan untuk melihat apakah ada masalah dari segi pengeluaran, kolektabilitas, atau kepesertaan. Dari segi pengeluaran, ditemukan *fraud* tapi angkanya di bawah satu persen. Dari segi kolektabilitas secara total bagus tetapi kolektabilitas dari peserta mandiri belum optimal. Setelah mengkaji keseluruhan hasil audit tersebut ditemukan bahwa ternyata persoalan defisit adalah karena iuran yang belum sesuai. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan penyesuaian iuran yang besarnya dihitung oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN).

Apa yang diharapkan dengan adanya penyesuaian iuran JKN-KIS?

Yang pasti dengan adanya penyesuaian iuran ini, diharapkan dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi defisit (dalam konteks transaksi berjalan) sehingga apabila arus kas program bagus, otomatis berdampak ke arus kas rumah sakit. Pastinya rumah sakit akan lebih nyaman dan bisa mengembangkan layanan lebih baik lagi. Dengan demikian, komitmen kita dalam kontrak juga dapat diperkuat.

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena penurunan kelas kepesertaan JKN-KIS pasca penyesuaian iuran?

Kita tidak akan mempersulit peserta yang ingin turun kelas karena kita tidak ingin menyusahkan masyarakat dengan penyesuaian iuran ini. Dari segi keuangan pun hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena meskipun turun kelas maka tarif kelas rumah sakit akan menyesuaikan juga, tetapi perlu

ditekankan bahwa mutu layanan medis semua sama di tiap kelas, tidak ada pembedaan. Kami yakin penyesuaian ini butuh proses dan nantinya akan tercipta keseimbangan baru.

Perbaikan layanan apa yang diberikan oleh BPJS Kesehatan pasca penyesuaian iuran ini?

Kita mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan, baik yang langsung di rumah sakit maupun melalui fasilitas layanan kita. Perbaikan yang langsung di rumah sakit antara lain, penguatan peran petugas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. Jadi kita menempatkan petugas kita dengan atribut rompi bertuliskan BPJS Satu Siap Membantu di rumah sakit mitra BPJS, utamanya yang memiliki jumlah pasien 1000 orang/hari, untuk memastikan peserta tidak mendapatkan hambatan layanan. Kedua, kita buat program PRAKTIS atau Perubahan Kelas Tidak Sulit untuk mengakomodir peserta yang ingin turun kelas pasca penyesuaian iuran.

Ketiga, *display* ketersediaan tempat tidur pada masing-masing kelas di rumah sakit secara *real-time* agar masyarakat bisa melihat dengan transparan. Saat ini sudah hampir 80% rumah sakit mitra kita memiliki *display* tempat tidur. Selanjutnya, *display* tindakan operasi agar pasien yang masuk dalam *waiting list* operasi memiliki kepastian jadwal operasi dan alasan *waiting list*. Implementasi program ini masih terbatas, saat ini baru ada di RSUD Margono Soekarjo di Purwokerto. Di samping itu, kita juga ada program simplifikasi pelayanan pasien hemodialisa.

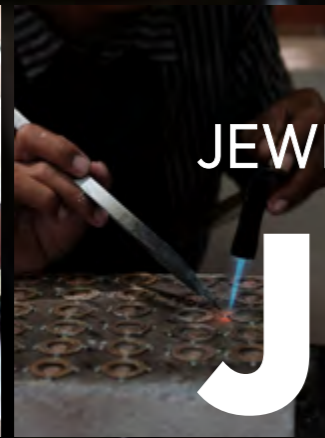
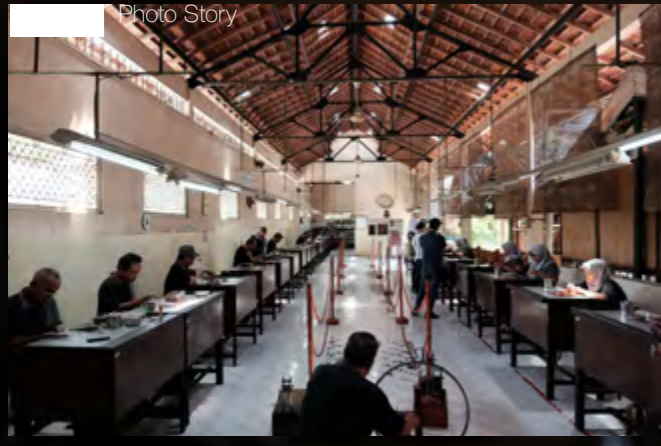
Lebih dari itu, semua komitmen kita diintegrasikan *online* dalam bentuk *mobile apps*, yakni Mobile JKN. Kita juga mendorong rumah sakit mitra untuk membuat registrasi, antrian, dan rujukan secara *online* demi kenyamanan dan kepastian waktu layanan bagi pasien.

Saat ini sudah sekitar 1000-an fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki layanan registrasi *online*. Kita akan tingkatkan layanan Mobile JKN ini secara masif.

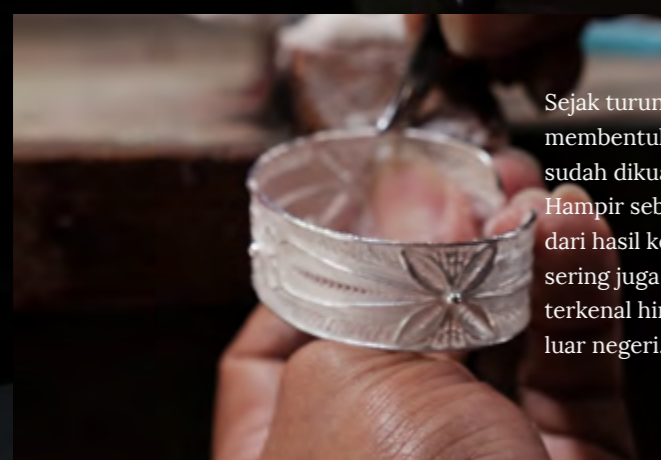
Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan JKN?

Penyesuaian iuran yang saat ini dijalankan baru menyelesaikan permasalahan arus kas atau defisit transaksi berjalan. Setelah ini, kita perlu memikirkan bagaimana mengisi aset karena jaminan sosial yang baik adalah yang memiliki aset yang bagus. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, pertama, pastikan dulu iuran sesuai dengan hitungan aktuarial, kemudian kontribusi dalam segi iuran ini kita buka dengan konsep gotong royong besar yang betul-betul memastikan kontribusi sosial masyarakat sesuai dengan status sosialnya. Konsep gotong-royong ini pada dasarnya yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua, dan seterusnya.

Selanjutnya, kita perlu duduk bersama mendefinisikan kebutuhan dasar kesehatan seperti apa dan kelas standar JKN yang bagaimana yang dijamin Undang-Undang. Jadi kita harus komprehensif. Terakhir, kita harus sama-sama membangun ekosistem yang bagus. Dari segi regulator, apakah regulasi yang dikeluarkan instansi terkait mendorong terjadinya pelayanan yang seharusnya, misal adanya pedoman nasional pelayanan kedokteran. Lalu dari segi data, bagaimana ekosistem akan membuat data itu *verified* dan valid. Peran daerah dalam membangun ekosistem ini penting. Dari BPJS, bagaimana membangun layanan bermutu tinggi. Yang tidak kalah penting juga yaitu kesadaran masyarakat membayar iuran karena ini pun termasuk ekosistem. Jadi program ini bisa optimal manakala semua ekosistem bisa terbentuk dengan baik.



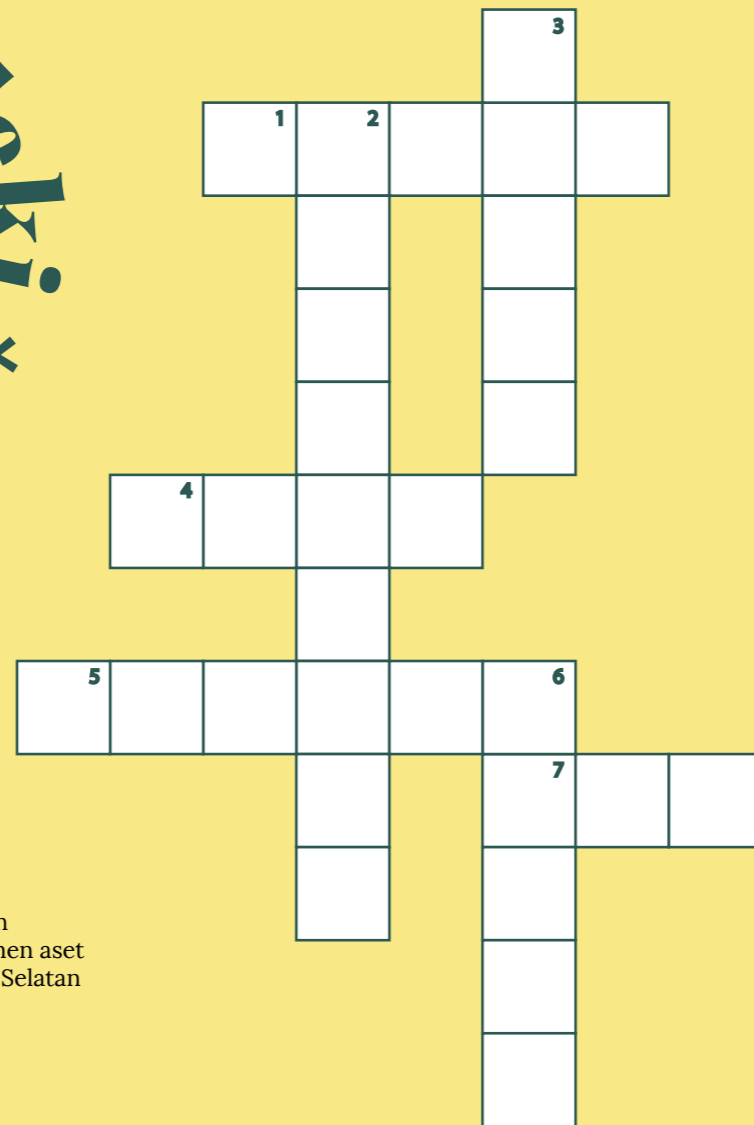
JEWELLERY of Jogja



Sejak turun menurun, seni menempa, mengukir, dan membentuk perak menjadi berbagai macam bentuk sudah dikuasai oleh orang-orang Kotagede Yogyakarta. Hampir sebagian besar warga Kotagede mencari nafkah dari hasil kerajinan perak ini. Pusat kerajinan perak yang sering juga disebut dengan Jewellery of Jogja ini sangat terkenal hingga ke mancanegara dan sudah diekspor ke luar negeri.



*Teka *Teki *Medken *Teki



Mendatar

1. Nama tokoh dalam komik Media Keuangan
4. SMV Kemenkeu yang mengurus manajemen aset
5. Kepulauan terluar Indonesia di Laut Cina Selatan
7. Peraturan Menteri Keuangan

Menurun

2. Nama konsep calon ibu kota negara baru
3. Rasa ingin bertemu
6. Batas akhir pelaporan SPT Badan adalah tanggal 30 bulan

Kirim jawaban Anda melalui *story post* instagram dengan *tag* IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 Maret 2020.



Asa di Ibu Kota Baru

Teks Reni Saptati D.J

Sibarani Sofian,
Ketua Tim Pemenang Sayembara Ibukota Negara

Foto
Anas Nur Huda

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditandaskan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Agustus 2019. Menegaskan keseriusannya, pemerintah menggelar

sayembara konsep desain IKN guna mencari gagasan terapis. Pelbagai tanya muncul, bagaimana rupa ibu kota baru? Masyarakat Indonesia menggantung asa akan hadirnya sebuah kota baru yang lebih baik dan representatif.

“Nagara Rimba Nusa”, desain karya tim yang digawangi Sibarani Sofian terpilih sebagai juara, mengungguli 754 peserta lain. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung dan University of New South Wales tersebut



Konsep IKN
Nagara Rimba
Nusa

Foto
Dok.
Urbant +

menceritakan kepada Media Keuangan bagaimana konsep IKN yang dirancang timnya. Berikut petikannya.

Judul desain “Nagara Rimba Nusa” terdengar menarik. Apa makna konsep desain tersebut?

Pada saat kompetisi, kami harus memberikan keunggulan skema kami dalam hitungan detik. Ada tiga kata: “Nagara Rimba Nusa”. Nagara maksudnya pemerintahan atau kota. Rimba karena Kalimantan diasosiasikan dengan hutan. Saya tidak bisa menyebut Nagara Kalimantan, jadi saya menyematkan Rimba sebagai representasi Kalimantan. Nusa berarti pulau. Kita adalah orang kepulauan, sehingga pulau menjadi identitas bersama.

Rimba dan Nusa juga memberikan konsep hijau atau lingkungan, bahwa apa pun yang kita lakukan di sana, kita punya kedekatan dengan alam. Mungkin nanti akan banyak tekanan dari luar

yang menyebut Indonesia akan merusak hutan. Saya berinisiatif untuk menjawab justru konsep kami ialah melestarikan hutan. *We will take care of the forest.*

Ada sumber inspirasi tertentu?

Tidak ada yang spesifik. Kami berlatar belakang konsultan masterplan. Urat nadi kami adalah perencana kota. Inspirasi bukan harus dicari, tetapi kami sehari-hari sudah hidup dengan itu. Filosofi kami yaitu membangun seimbang dengan alam. Untuk ibu kota ini, kami sengaja memilih tema penguatan pada alam.

Mungkin inspirasi paling dekat adalah kota ramah lingkungan, seperti Masdar City dan beberapa kota di Tiongkok. Kota-kota tersebut dijadikan inspirasi bukan dari fisiknya, melainkan dari tujuannya yang sangat ramah dengan alam dan air. Kota lama seperti ibu kota Australia yang dekat danau juga bagian dari inspirasi. Namun, tidak ada satu pun kota yang spesifik dijadikan

rujukan. Kami cari *the best of the worlds* dari luar, tetapi harus unik Indonesia. Ini seperti yang diminta Pak Jokowi, harus unik Indonesia.

Apa yang khas dari desain ini?

Kami menambahkan beberapa aspek seperti Danau Pancasila, Plaza Bhinneka Tunggal Ika, dan galeri Adi Budaya. Sejak pertama, saya setuju Pancasila harus ada representasinya di IKN. Dan itu tidak banyak. Di negara-negara lain tidak ada yang secara gamblang membuat simbol dasar negaranya di ibu kotanya. Cara kami menanamkannya di dalam perencanaan adalah dengan menggunakan konsep danau.

Penggunaan konsep danau ini apakah karena lokasi ibu kota baru dekat dengan danau?

Lokasi yang diberikan merupakan hamparan seluas 220.000 hektar, seperti Jabodetabek. Jakarta sendiri hanya 55.000 hektar. Dari sebesar itu, ibu kota

hanya perlu 6.000 hektar. Ada peserta sayembara yang memilih lokasi di bukit, dekat kampung, atau dekat hutan. Kami memilih dekat air.

Lokasi desain kami dekat dengan Teluk Balikpapan. Air danau bisa berasal dari laut dari Teluk Balikpapan, atau bisa juga kami buat. Di sebelah lokasi ada sungai cukup panjang sampai atas bukit, sehingga air datang dari sana. Hal ini merupakan bagian dari konsep *sustainability* dimana sumber air tidak boleh diambil dari dalam tanah. Kami mengambil air permukaan yang *sustainable* dan alami.

Lokasi ini masih belum pasti. Beberapa kementerian akan melakukan studi bersama. Bappenas sedang mengerjakan *feasibility study*. Kami akan merapat ke Bappenas untuk mencari lokasi terbaik. Jika lokasinya tidak dekat air, danau harus dibuat. Adapun lokasi yang kami usulkan tidak perlu danau buatan.

Seperti apa kolaborasi dengan pemenang kedua dan ketiga?

Kami sudah mulai dipertemukan beberapa kali. Konsep pemenang kedua dan ketiga mempunyai keunggulan, hanya berbeda lokasi dan konteks. Namun, ada elemen-elemen yang dirasa bagus oleh Kementerian PUPR. Tugas kami adalah mengkonsolidasikan rencana-rencana ini menjadi rencana *the best of the three*. Basisnya memakai rencana kami, tetapi elemen dua konsep desain lainnya dimasukkan.

Sebagai contoh, elemen pemenang kedua sangat *high tech*. Ada *autonomous car* dan ada *google car*. Jika lokasi yang nantinya terpilih adalah berbukit, saya pikir itu harus diadaptasi. Nah, untuk desain ketiga sangat menarik karena tipe bangunan dan bentukannya menyatu dengan *fabric*

yang sudah ada. Namanya Kota Seribu Galur. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan memberikan satu masterplan gabungan dari beberapa desain. Bukan tidak mungkin juga ada masukan dari Bappenas dan Pak Jokowi.

Bagaimana arahan Presiden Jokowi terhadap desain ibu kota baru?

Pertama, harus unik, harus Indonesia-sentris. Kedua, harus *future ready*, mempunyai keunggulan yang mana dia bukan dibangun untuk hari ini, tetapi 50-100 tahun ke depan. Ketiga, lokasi cukup tinggi.

Keempat, kita jangan hanya memasukkan bangunan baru dan orang-orang baru. Kita harus memasukkan semangat, gaya hidup, dan cara hidup yang berbeda dan baru. Kelima, memungkikan teknologi masa mendatang berupa *Artificial Intelligence* serta *autonomous car*.

Bagaimana konsep kantor pemerintahan dan hunian ASN?

Hutan tropis punya beberapa lapisan, ada lapisan akar, permukaan, kanopi, dan *emergence*. Kami mengadaptasi cara hidup hutan tropis dan menganalogikannya dengan bentuk bangunan perumahan, komersial, dan kantor pemerintahan.

Untuk lapisan akar, kami buat infrastruktur bawah tanah. Listrik, air, *fiber optic*, komunikasi, bahkan aliran kanal banjir terintegrasi di bawah secara efisien. Lapisan selanjutnya menjadi *ground floor*, yaitu daerah paling *diverse*, paling ramai, serta dipenuhi berbagai aktivitas.

Kami buat kawasan itu teduh dengan *shadow* bangunan. Kami desain agar matahari tidak langsung mengenai atas daerah terbuka tersebut, walaupun sedang jam 12 siang. Itu namanya *passive*

design. Nah, ini lapisan tengah. Kami juga akan mengatur koridor angin. Suhu di Kalimantan rata-rata 34 derajat celsius. Riset menunjukkan, jika angin diarahkan dengan baik, suhu bisa turun 1-2 derajat.

Pernah menanam pohon di depan rumah? Cabang pohon bergeser jika tumbuh dekat dengan pohon lainnya. Itu karena pohon saling berbicara. *They talked to each other* di *branch level*. Di situ tupai, monyet, dan burung tinggal. Mereka bisa *crossed* dengan baik tanpa harus turun. Yang kami usulkan untuk perkantoran adalah menghubungkan gedung dan gedung di level atas menggunakan jembatan penghubung. Ada juga *electric tram* untuk jalan ke gedung lain.

Di lapisan teratas atau *emergence*, pohon berkompetisi mendapatkan cahaya. Yang paling sukses ialah pohon paling tinggi. Nantinya ada bangunan-bangunan yang harus lebih tinggi daripada lainnya dan mendapatkan *privilege* untuk mendapatkan cahaya maksimal di atas. Di situ akan kita taruh teknologi panel surya *photovoltaic*. Kita berusaha tidak menggunakan *fossil fuel* lagi.

Dengan desain Anda, apakah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dapat selesai pada 2024?

Jika tidak mempertimbangkan masalah *legal framework* dan pembiayaan, dari segi penyediaan gambar teknis bisa kita kejar. Jadi, misalnya pekerjaan kami adalah menyediakan gambar-gambar untuk bisa ditenderkan, saya rasa bisa walaupun itu sangat singkat. Secara teknis kami siap, hanya memang tidak bisa semua bagian kotanya jadi. Yang jadi adalah bangunan-bangunan utama.

KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH

Transformasi Wali Transaksi Luar Negeri

Teks A. Wirananda

Langit Juanda yang meredup dalam waktu singkat tampak tak mempengaruhi geliat manusia di bawah naungannya. Penjaja makanan, pemandu parkir, petugas keamanan, serta sekumpulan orang yang pulang dari berburu makan berbaur memeriahkan siang di Juanda. Tak ada tanda-tanda geliat manusia yang meredup. Pun di dalam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH). Tampak satu dua pengunjung menyerahkan sejumlah berkas di meja layanan, dan sebagian lainnya setia menanti giliran menyerahkan berkas serupa. Tak satupun tampak kekurangan gairah.

Begitu pula dengan A.A. Gunawan, ia tampak bersemangat menjalani sianginya. Pria yang belum genap setahun didapuk jadi Kepala KPPN KPH antusias berbagi tentang sejarah dan masa depan kantornya.



Pembagian Wewenang

KPPN KPH dibentuk pada 1999. Semula, kantor ini bernama KPPN Jakarta VI. Sebelum pembentukan KPPN ini, aktivitas penyaluran pinjaman dan hibah dilaksanakan oleh Direktorat Tata Usaha Anggaran yang berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Saat itu, Direktorat Tata Usaha Anggaran menaungi enam subdirektorat yang masing-masing menangani ihwal penyelenggaraan bendahara umum negara, penyelenggaraan bantuan luar negeri, serta administrasi bantuan luar negeri. Kala itu, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan masih merupakan satu entitas. Gunawan mengatakan bahwa salah satu alasan pembentukan KPPN KPH saat itu adalah perlunya pemisahan fungsi pembuat peraturan dan pelaksana peraturan. “(Untuk) memisahkan antara regulator dan operator, dibentuklah KPPN Jakarta VI waktu itu untuk penyaluran pinjaman,” katanya berkisah. Sedangkan penyusunan regulasi terkait penyaluran pinjaman tetap dilakukan di Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Tubuh organisasi terus berkembang untuk menyelaraskan diri dengan zaman dan mengoptimalkan pelayanan. Perkembangan itu membawa Kementerian Keuangan melewati beberapa fase perubahan struktur organisasi. Termasuk pemisahan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Humaniasi dalam beberapa kegiatan

Foto Dok. Biro SDM



Kegiatan di front office KPPN KPH

Kepala Kantor KPPN KPH

Foto Anas Nur Huda

pinjaman luar negeri,” ia melanjutkan, “juga membayar kembali utang luar negeri, *repayment*.” KPPN KPH saat ini menangani penarikan pinjaman, pengesahan belanja luar negeri, penyaluran, serta pembayaran kembali utang luar negeri.

Misi reformasi

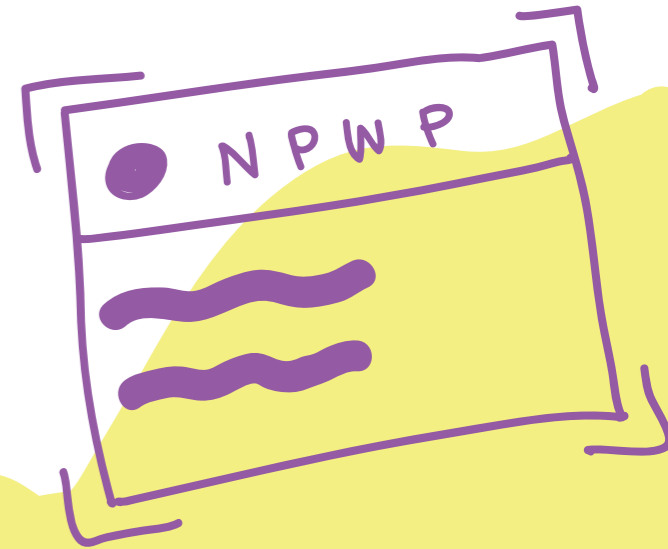
Ihwal perubahan, Gunawan merasa perlu adanya revitalisasi dan reformasi untuk kantor yang lahir berdekatan dengan kelahiran era reformasi ini. KPPN yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda, Jakarta Pusat ini, menurutnya, perlu dilakukan reformasi. “KPPN kami sejak awal belum reformasi, (baik) bisnis prosesnya, teknologi informasinya, SDM-nya, prasarananya juga masih belum,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa bisnis proses di KPPN KPH masih dilakukan secara manual. Dengan reformasi yang dicanangkannya, ia berharap meningkatnya kualitas layanan melalui modernisasi dan simplifikasi proses bisnis. Ia berharap perubahan serius ini dituntaskan di masa kepemimpinannya.

Tak ada yang mudah dalam menghadapi perubahan. Sebab perubahan tanpa arah tentu bukan keputusan yang baik untuk dieksekusi. Untuk dapat menentukan arah perubahan dengan presisi, Gunawan bersama timnya menitikberatkan reformasi kali ini pada beberapa prioritas. “Pertama, penguatan fungsi ya. Kita perlu koordinasi lebih kuat dengan *lender*, dengan BI, dengan satker,” katanya. Penguatan ini, menurutnya, juga mencakup penguatan koordinasi antar sektor. Selain penguatan fungsi dan koordinasi, ia juga menekankan adanya modernisasi dan simplifikasi proses bisnis. Tak kalah penting menurutnya adalah sarana dan prasarana. Proses bisnis yang mutakhir tanpa didukung sarana yang mumpuni tentu tak akan optimal. Terakhir, ia mengatakan bahwa salah satu yang paling krusial adalah ihwal sumber daya manusia. Gunawan mengajak seluruh lini di KPPN KPH untuk siap dengan perubahan yang tentu saja tak akan bebas dari tantangan.

Tak sampai di situ, Gunawan beranggapan perlunya perubahan struktur organisasi KPPN itu sendiri demi mengoptimalkan peran dan layanan kepada pengguna. “Kalau saya inginnya kami jadi khusus menangani pembiayaan. (Kami) kemarin usul nomenklaturnya berubah menjadi KPPN Khusus Pembiayaan dan Transaksi Internasional,” katanya. Ia menjelaskan, “Kenapa ada transaksi internasional? Karena ada juga transaksi-transaksi yang bukan bersumber dari pinjaman tapi ia (berbentuk) valas.” Sedangkan transaksi valuta asing hanya dapat dilakukan di KPPN KPH karena KPPN ini satu-satunya yang memiliki ragam valuta asing yang memadai.

Perubahan yang tentu saja berdampak pula pada KPPN Jakarta VI. “Kemudian tahun 2012, namanya berubah menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah,” pria kelahiran Tasikmalaya ini melanjutkan kisahnya. Seiring waktu bergulir, KPPN KPH tak semata menangani penyaluran pinjaman saja. Gunawan mengatakan, “Selain untuk menyalurkan, ya, pembiayaan yang bersumber dari

Membuat NPWP Pribadi Secara Online



1. Buka tautan **ereg.pajak.go.id**. Klik Daftar. Masukkan alamat email. (* Pastikan email masih aktif)



2. Cek email. Klik **tautan verifikasi** yang diterima di email Anda. Lengkapi formulir data diri.



3. Cek kembali email untuk mendapatkan **tautan aktivasi**. Klik tautan aktivasi.



4. Akses kembali **ereg.pajak.go.id**. **Login** menggunakan email dan sandi yang telah dibuat.



5. Lengkapi formulir. **Unggah file** dokumen persyaratan sesuai dengan kategori pajak.



6. Klik menu token untuk mendapatkan **kode unik** sebagai syarat pengajuan.

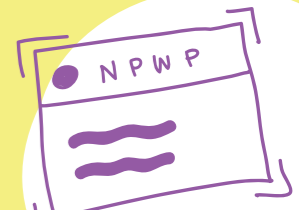


7. Cek email. Temukan **nomor token** lalu klik Kirim Permohonan. Masukkan nomor token.



8. Tunggu **konfirmasi** apakah pengajuan Anda ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui email.

NPWP diterbitkan paling lama **1 (satu) hari kerja** terhitung setelah permohonan diterima lengkap.



Mengelola Manusia dari Hati

Teks Dimach Putra | Foto Anas Nur Huda



Humaniati

KEPALA BIRO SDM,
SEKRETARIAT JENDERAL

Menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) bukanlah impian Humaniati. Lulusan psikologi Universitas Gajah Mada itu awalnya ingin meniti karier di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di industri perbankan. Restu sang ibu yang justru membawa langkahnya mendaftar pekerjaan menjadi abdi negara.

Pertimbangannya cukup logis, selain faktor usia yang telah menginjak angka 28, saat itu ia pun telah memiliki momongan. Ritme pekerjaan PNS yang lebih stabil dan jaminan hari tua dirasa lebih cocok baginya yang telah berkeluarga. Berbeda dengan korporat swasta yang kebanyakan menitikberatkan pada pemenuhan target dan profit. Siapa sangka pilihan tersebut mengantarnya ke posisi yang cukup strategis. Setelah hampir tiga dasawarsa mengabdikan, ia kini menempati jabatan sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di pundaknya kini dititipkan masa depan puluhan ribu pegawai di Kemenkeu. Dari dirinya komando pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM Kemenkeu berasal.

Amanah yang diembannya kini bukan diraih tanpa perjuangan. Karier wanita yang akrab dipanggil Ati ini diawali saat ia direkrut sebagai tenaga psikolog di Kemenkeu. Saat itu, termasuk dirinya, hanya ada dua orang psikolog di Kemenkeu. "Karena cuma dua orang, kami dituntut untuk bekerja seefektif mungkin dan mandiri. Termasuk dalam mengambil keputusan," kenang Ati.

Pekerjaan yang diampu Humaniati saat itu berkaitan dengan

penyelenggaraan beragam tes psikologi berdasarkan kebutuhan, contohnya untuk Diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan). Di masa awal meniti karier, di saat belum dikenal istilah "reformasi birokrasi", Atik banyak ditempa dari pengalamannya. Ia banyak dihadapkan pada situasi yang menguji integritas dan ketegasannya. Oknum-oknum internal maupun eksternal banyak yang ingin mendapat *privilege* tersendiri dengan mencurangi hasil tes mereka. "Saya tetap bergeming, dari situ saya belajar betul tentang integritas, *decisive judgement*, dan *resilience*," ucapnya mantap.

Manajemen talenta jadi senjata

Berbagai pengalaman yang menempanya, membuat wanita kelahiran Madiun ini semakin paham bagaimana memetakan pegawai di Kementerian Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, pembangunan pengelolaan SDM berbasis sistem merit dimulai. Pembangunan sistem yang dimulai sejak tahun 2007 itu berbarengan dengan dimulainya era reformasi birokrasi. Dari yang awalnya sangat administratif, infrastruktur pengelolaan SDM dikembangkan menjadi berbasis kompetensi / *competency based human resources management* (CBHRM). "Kita mengubah paradigma pengelolaan SDM, karena sistem merit ini berbasis kompetensi, kualifikasi dan kinerja," ucapnya menjelaskan.

Pembangunan kompetensi dimulai dari sektor manajerial, kemudian berlanjut ke pembangunan sistem manajemen kinerja yang kini menjadi basis dari sisi penilaian kinerja. Untuk menjadikan pegawai memiliki kualifikasi yang baik, Biro SDM membangun *human*

capital development plan, kode etik, pola mutasi dan lain-lain. Semua sistem ini disempurnakan menjadi pondasi dan pada akhirnya mendukung pelaksanaan sistem merit. Setahun setelah menjabat sebagai Kepala Biro SDM, pada 2014 istilah sistem merit baru mulai dikenal secara nasional melalui undang-undang ASN.

"Kita diuntungkan karena mulai *dulu*, udah diimplementasikan sejak 2007," serunya bangga. Langkah berikutnya yang diambil oleh ibu dua anak ini adalah konsisten menyempurnakan pengelolaan SDM berbasis merit. Bukan kebetulan jika pada tahun 2019 Kementerian Keuangan kemudian berhasil memperoleh predikat 'sangat baik' atas implementasi sistem merit dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Ia sangat bersyukur karena Sekretaris Jenderal Hadiyanto, sebagai atasannya langsung sangat mendukung dan memberi perhatian khusus. Tak hanya saat proses penilaian, tapi lebih lagi untuk implementasi sistem merit di Kementerian Keuangan.

Pencapaian ini menandakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi telah berhasil diterapkan di Kemenkeu. Dari delapan aspek penerapan sistem merit dengan nilai ideal 400, Kemenkeu berhasil mencatat 382,5 poin. Hal itu menunjukkan Kemenkeu sudah hampir memenuhi kondisi ideal yang diharapkan.

Bibit kebaikan dari keluarga

Kecintaan Humaniati dalam memahami karakter manusia dan nilai kemanusiaan berangkat dari apa yang



Humaniati dalam beberapa kegiatan

Foto Dok. Biro SDM

diajarkan di rumah dan keluarganya. Ia mengaku sangat mengidolakan mendiang bapaknya sebagai sosok yang selalu menginspirasi. Seorang dosen dan cendekiawan, bapaknya adalah teman diskusi yang asyik baginya. Suatu momen kebersamaan yang selau ia rindukan kini.

Satu pesan dari ayah yang paling membekas adalah untuk tidak menghakimi orang lain. "Saat satu telunjuk kita menunjuk ke orang lain, artinya empat (jari) lainnya mengarah ke diri kita sendiri," ucapnya mengenang pesan sang bapak. Humaniati

memaknainya sebagai pengingat untuk selalu berintrospeksi. "Apakah kita sudah lebih baik dari yang kita tunjuk? Itulah mengapa saya banyak berdialog dengan diri saya sendiri. Apakah yang saya lakukan sudah benar?" lanjutnya.

Tak hanya dari sang bapak, ibunya sangat menanamkan disiplin, loyalitas dan kesabaran terutama dalam keluarga. Nilai tersebut sangat terlihat saat ibunya harus menemani sang bapak berbulan-bulan di rumah sakit hingga akhir hayatnya. Kepergian bapak menjadi hantaman pertama dalam

hidupnya. Meskipun dalam kondisi menyedihkan, Ia tetap bersyukur atas pelajaran yang didapat dari pengalaman itu. Tak hanya tentang kesabaran dan loyalitas dari ibunya, pemilihan makam untuk mendiang bapaknya yang berpesan dikubur di pemakaman umum, bersanding dengan makam warga lain dengan beragam keyakinan.

Mengabdikan demi institusi

Perjalanan karier Humaniati memang panjang dan berliku. Tapi dari pilihan karier yang diambilnya itu Ia merasa tak pernah bosan. Menurutnya, manusia itu selalu penuh kejutan. "Manusia itu *amazing*, muncul berbagai hal yang tidak terduga dari seorang manusia. Sampai sekarang saya tidak pernah berasumsi bahwa saya sudah memahami semuanya," ungkapnya.

Karakter manusia yang selalu berubah itu membuat wanita yang telah mengabdikan selama tiga dekade ini tidak pernah berasumsi telah tuntas memahami pengelolaan SDM. Ia merasa karena yang ditangani adalah manusia, sehingga kejutan-kejutan baru akan selalu muncul. Biro SDM sebagai pengelola dituntut untuk harus selalu siap, memenuhi kebutuhan pegawai, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Meskipun usianya sudah akan memasuki masa purnabhakti, Humaniati tetap memegang harapan tinggi bagi pengelolaan SDM di Kemenkeu. Ia terus akan memberikan yang terbaik dalam menyiapkan SDM Kemenkeu yang berintegritas, berkompentensi, namun tetap bahagia. Untuk itu ia selalu berpesan pada para jajarannya agar selalu mengeluarkan sisi atau versi terbaik bagi institusi. "Agar kita bisa selalu bertumbuh, untuk mencintai tanah air ini, Indonesia. Dan nantinya meninggalkan kondisi yang terbaik untuk generasi selanjutnya," pungkasnya.

Gagal Paham

Peresensi Ahmad Dwi

"Gagal paham", kalimat sederhana, terdiri atas dua kata, yang mungkin dapat mewakili kegagapan kita dalam memahami dunia baru. Semua bergerak begitu cepat, seakan siap menggulung siapa-siapa yang menolak bergabung. "Keterhubungan" menjadi kata dasar, yang mampu membuat gempar hanya dengan tagar-tagar. Dalam buku terbaru Prof. Rhenald Kasali seri Disrupsi ini, tersaji contoh-contoh terkini tentang mobilisasi yang bersinergi dengan orkestrasi, bagaimana Alibaba dengan #SingleDay menghasilkan triliunan dari hati para jomlo yang kesepian, bagaimana #MeToo menjadi bentuk perlawanan terhadap pelecehan seksual, juga bagaimana #OrangUtanFreedom mampu membuat ekspor sawit Indonesia ke Eropa kebat-kebit.

Di zaman digital, hal-hal viral tidak lagi tertangkal oleh jalan konvensional. Orkestrator sering kali menggunakan cerita yang menyentuh sisi emosional, untuk menggugah rasa kemanusiaan, hingga tercipta suatu gerakan massal. Layaknya dua sisi mata uang, kemajuan teknologi bisa menjadi alat kepentingan, bisa juga untuk tujuan kepedulian sosial. *Sharing, shaping, dan funding* menjadi perilaku konsumen dewasa ini, membuat teori *existing* menjadi penting untuk ditinjau kembali. Di era disrupsi, para pengambil kebijakan harus terus bertransformasi serta menyesuaikan diri, karena yang dihadapi hari ini adalah kerumunan yang terkoneksi.

General Electric, salah satu raksasa korporasi dunia yang mencoba

berinovasi, dengan Predix (perangkat lunak untuk analisis data mesin-mesin industry), optimis akan masuk sepuluh besar perusahaan teknologi global. New York Times pun menjulukinya *124 Year-Old Software Start Up Company*. Sayangnya jauh panggang dari api, Predix pun tidak sesuai prediksi. "*The main is no longer the main*" menjadi mantra yang tidak main-main. Kekuatan lama yang enggan keluar dari zona nyaman, dan masih bertopang pada penguasaan aset sebagai "*the main*"-nya, akan tergantikan oleh kekuatan baru yang tidak "gagal paham", yang mengutamakan penguasaan data sebagai sumber dayanya.

Melalui #MO, Prof. Rhenald Kasali mengajak para pembaca meninggalkan cara-cara kuno, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Menggunakan bahasa yang mudah, setiap masalah dalam buku ini dipaparkan secara terarah sehingga empat ratus halaman tetap bisa dibaca dengan menyenangkan. Fakta-fakta diulas sedemikian jelas, dipertegas dengan contoh-contoh yang lugas. Buku ini bukan hanya relevan untuk pembaca individu, namun juga untuk kalangan pemerintah, organisasi, profesional, korporasi, maupun akademisi.

Jika Anda ingin tetap kokoh berdiri di tengah derasnya arus disrupsi, Anda mesti pelajari dan kuasai strategi yang menjadi roh dari *New Power*, yakni mobilisasi dan orkestrasi.

Selamat membaca, selamat datang di dunia yang tiap masa berlalu selalu muncul pembaru.



Judul: MO, sebuah dunia baru yang membuat orang gagal paham

Penulis / Penerjemah: Rhenald Kasali

Tahun Terbit: 2019

Dimensi: 422 Halaman

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 13 Writes (Namun Kenyataannya, kehidupan tak selamanya berjalan mulus) Hardy Zhu, dkk
- 2 3 Cinta 1 Pria oleh Arswendo Atmowiloto
- 3 3 Women & A Guy Ana Westy
- 4 30 Day Revenge Mitch Albom
- 5 9 Summer 10 Autumns Dari Kota Apel ke The Big Apple Iwan Setiawan

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN UNTUK

Transparansi Fiskal dan Evaluasi Insentif

Teks M. Rifoy Nurfauzan Abdillah & Ulfa Angraini
 Analisis pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak menjadi sumber utama untuk membiayai APBN. Pada tahun 2019, penerimaan pajak menyumbang 82 persen dari total penerimaan negara dan ditargetkan naik menjadi 83 persen di tahun 2020. Meskipun bergantung pada penerimaan pajak, sejumlah insentif perpajakan tetap diberikan Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dunia usaha. Dari tahun ke tahun insentif perpajakan meningkat dari sebesar Rp192,6 triliun pada 2016 menjadi Rp196,8 triliun pada 2017 dan kemudian meningkat signifikan pada 2018 sebesar Rp221,1 triliun.

Di Indonesia, insentif perpajakan masuk dalam kategori belanja perpajakan pada laporan belanja perpajakan. Belanja perpajakan didefinisikan sebagai pendapatan pajak yang tidak dapat dikumpulkan atau yang berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan umum perpajakan (*benchmark tax system*) yang diberikan kepada subjek dan objek pajak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan khusus tersebut dapat berupa pembebasan jenis pajak (*tax exemption*),

pengurangan pajak yang harus dibayar (*tax allowance*), maupun penurunan tarif pajak (*rate relief*), dan lainnya.

Dalam definisi belanja perpajakan disebutkan adanya perbedaan antara ketentuan khusus dan ketentuan umum perpajakan (*benchmark tax system*). Konsekuensinya adalah Pemerintah harus menentukan ketentuan umum perpajakannya dengan tepat. Dalam laporan belanja perpajakan, Pemerintah telah menentukan kategori ketentuan umum perpajakan untuk masing-masing jenis pajak dan juga membuat *positive list* berisi deviasi-deviasi dari ketentuan umum perpajakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Selain menentukan ketentuan umum perpajakan, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menghitung besarnya belanja perpajakan adalah melihat ketentuan khusus apa saja yang menjadi belanja perpajakan. Apabila telah memenuhi kriteria, perhitungan belanja perpajakannya dapat dilakukan.

Angka-angka yang disajikan dalam laporan belanja perpajakan membuat Pemerintah dapat memperhitungkan *cost-benefit* dalam kebijakan insentif

perpajakan yang dikeluarkan. Pelaporan angka tersebut secara berkala dapat memudahkan Pemerintah dalam mengevaluasi dan memantau efektivitas insentif perpajakan. Dengan demikian, kebijakan insentif perpajakan dapat dinyatakan efektif atau tidak efektif.

Berkaca pada pengalaman Belgia dalam program “*Notional Interest Program*” yang dilakukan pada tahun 2006, evaluasi kebijakan insentif perpajakan harus menjadi perhatian. Sebelum program tersebut dilakukan, Belgia memperkirakan akan kehilangan penerimaan perpajakannya senilai X. Setelah program berjalan, Belgia melakukan evaluasi dan menemukan bahwa penerimaan perpajakannya hilang 3X atau tiga kali lebih besar dari perkiraan. Hal ini memperlihatkan bahwa *cost* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan *benefit*-nya, sehingga Belgia pun melakukan amandemen atas peraturan tersebut.

Selain mengetahui efisiensi suatu kebijakan, evaluasi atas kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Jika Belgia menghadapi inefisiensi pada

Ilustrasi
M. Fitrah



kebijakannya, Indonesia menghadapi kenyataan bahwa kebijakan yang ditawarkan kurang menarik, seperti kebijakan *tax holiday* melalui PMK Nomor 103/PMK.010/2016. Kompleksitas administrasi dan ketidakpastian atas hasil pengajuannya meski bidang usaha tersebut memenuhi kriteria menjadikan kebijakan tersebut tidak menarik.

Pemerintah pun menerbitkan peraturan baru tentang *tax holiday* melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018. Peraturan ini mengubah paradigma dalam pemberian *tax holiday* dari sebelumnya ‘*verify before trust*’ menjadi ‘*trust and verify*’. Efek positif dari penyederhanaan sistem dan kepastian pemberian fasilitas ini terbukti menghasilkan investasi sembilan kali lebih besar (per Juli 2019) dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan pentingnya laporan

belanja perpajakan dan diharapkan laporan tersebut dapat mempermudah Pemerintah mengevaluasi kebijakan insentif perpajakan lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus.

Penerbitan laporan belanja perpajakan juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penerbitan laporan juga sejalan dengan rekomendasi BPK untuk menjalankan transparansi fiskal yang merujuk pada IMF’s *Fiscal Transparency Code*. Meskipun transparansi fiskal merupakan komitmen global, namun tak banyak negara yang melaporkannya secara berkala. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Filipina yang melakukannya. Melalui transparansi fiskal, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan pada saat yang bersamaan rakyat dan

pemerintah dapat menilai *cost* dan *benefit* kebijakan insentif.

Laporan Belanja Perpajakan merupakan laporan kedua yang berhasil diterbitkan. Berbagai perbaikan diupayakan Pemerintah. Salah satunya adalah perluasan cakupan pajak dari yang sebelumnya hanya tiga jenis yakni PPN, PPh, dan Bea Masuk dan Cukai menjadi empat jenis pajak yaitu ditambah PBB sektor P3. Semoga kedepannya perhitungan laporan belanja perpajakan dapat terus disempurnakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan insentif perpajakan dapat dilakukan dengan lebih baik.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Liuk Elok Kelok 9

Terletak di perbatasan provinsi Sumatera Barat dan Riau, Jembatan Kelok 9 membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi mencapai 58 meter. Jembatan yang membentang sepanjang 2,5 km ini dibangun pada 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jembatan ini berasal dari APBN sebesar Rp602,55 miliar dan pengerjaannya ditangani dalam dua tahapan pembangunan. Dengan menggunakan konsep pembangunan '*Nature and Engineering in Harmony*', jembatan ini sangat unik karena menyatu serta melengkapi kelestarian lingkungan cagar alam. Konstruksinya dirancang bisa menahan beban vertikal dan gempa. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan dioperasikannya Kelok 9 akan bisa menekan biaya operasional kendaraan dan penumpang hingga Rp 134,5 miliar per tahun. Keberadaan Jembatan Layang Kelok 9 ini berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Dengan lancarnya transportasi, maka akan mempermudah akses lintas barat dengan lintas timur Sumatera.



Foto dan Teks
Resha Aditya P

Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

Teks Joko Tri Haryanto
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Ada hal menarik dari rilis terbaru Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang data kejadian bencana selama kurun 2019 kemarin. Meski terus dirundung petaka, namun intensitas bencana 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 tercatat kejadian bencana mengalami puncaknya sebanyak 2.869 kejadian, disusul 2018 sebanyak 2.573 kejadian. Tahun 2019 sendiri bencana yang terjadi sebanyak 1.315 kejadian, lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.694 kejadian. Meski mengalami penurunan dari sisi intensitas kejadian, hal yang tak boleh dilupakan adalah skala bencana yang harus dapat dimitigasi luasannya.

Yang juga wajib diwaspadai adalah dominasi jenis bencana hidrometeorologi, mengingat posisi Indonesia yang masuk di wilayah tropis antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Jenis bencana tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan kondisi iklim, cuaca, serta musim di berbagai wilayah di nusantara.

Ancaman ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah mengingat potensi kerusakan yang bersifat masif di berbagai sektor ditambah lagi hal ini sudah menjadi keprihatinan bersama di dunia. *Economist Intelligence Unit (EIU)* saja misalnya, baru merilis Indeks Ketahanan Perubahan Iklim (*Climate Change Resilience Index*) global.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan iklim di seluruh dunia secara langsung dapat menelan biaya ekonomi hingga US\$ 7,9 triliun per 2050 akibat konektivitas ragam bencana yang dihasilkan baik kekeringan, banjir, gagal panen, serta jenis lainnya. Dimensi kebencanaan inilah yang dikhawatirkan akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan infrastruktur di seluruh dunia. Indeks juga menyebutkan bahwa berdasarkan tren yang ada saat ini, potensi pemanasan global dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) di setiap negara hingga kisaran 3 persen pada periode 2050.

Meski demikian, dampak akan semakin besar di negara berkembang

dimana Benua Afrika akan mengalami penurunan terbesar mencapai 4,7 persen PDB. Angola diperkirakan menjadi yang paling rentan sekitar 6,1 persen PDB nya akan tergerus, disusul Nigeria sebesar 5,9 persen PDB, Mesir mencapai 5,5 persen PDB, Bangladesh sekitar 5,4 persen PDB serta Venezuela mencapai 5,1 persen PDB. Karenanya dibutuhkan aksi nyata saat ini dan juga nanti sebagai bentuk upaya mengurangi potensi dampak yang dihasilkan. Kegiatan nyata pun tidak akan cukup jika dikerjakan dengan pola *Bussiness As Usual* (BAU) semata.

Sebelumnya, lebih dari 11 ribu ilmuwan di 156 negara dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, juga sepakat menyebutkan bahwa dunia sedang darurat iklim. Mereka juga mengamati berbagai potensi dampak buruk yang ditimbulkan apabila manusia tidak mengubah pola perilakunya. Jika dirunut, hal tersebut bukan yang pertama kalinya karena sebelumnya tahun 2017, sekitar 16 ribu ilmuwan dari 184 negara turut serta dalam sebuah publikasi yang meyakini bahwa manusia

Ilustrasi
A. Wirananda



dan alam berada di jalur yang tidak tepat.

Laporan terbaru oleh *BioScience*, jurnal ilmiah *peer review* menguatkan statemen ini.

Di level implementasi, banyak hal yang mengindikasikan dunia darurat iklim. Berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), betul-betul menimbulkan keprihatinan yang luar biasa. Banjir bandang Jabodetabek di awal tahun 2020 menjadi indikasi lainnya. Secara ekonomi, beberapa pengamat memperkirakan dampak kerugian mencapai Rp135 miliar per hari di samping dampak kerugian nonekonomi lainnya. Terlepas dari besarnya dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan, peristiwa ini juga memberikan tekanan yang besar bagi upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia, sejatinya menjadi salah satu pemain utama dalam isu mengatasi dampak perubahan iklim ini. Tak heran jika banyak pihak menuntut agar penanganan karhutla dipimpin langsung oleh Presiden, demi mencegah berbagai tarikan kepentingan antarsektor yang terkadang justru menjadi penghambat solusi penanganan.

Berubah atau Punah

Besarnya dampak destruksi yang ditimbulkan, mendesak munculnya sebuah upaya kolektif bersama seluruh pemangku kepentingan global untuk mengambil langkah-langkah revolusioner. Jargon yang diusung adalah gerakan dekarbonisasi laju pertumbuhan ekonomi. Perlu disadari bahwa pendekatan konvensional dengan menempatkan target pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan bangsa, menimbulkan sifat kanibalisme antarnegara. Semua negara berlomba-lomba saling mengalahkan laju ekonomi negara lainnya tanpa mempertimbangkan praktek-praktek yang dijalankan justru menembus daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dari seluruh penjelasan ini, terlihat betapa sentralnya peran negara dalam mewujudkan tujuan mengatasi dampak perubahan iklim. Negara dengan segala pranata dan kelengkapannya mampu dan memiliki kapasitas menjadi garda terdepan kelangsungan ekologi demi keberlanjutan antargenerasi.

Namun demikian, segala upaya menjadi sia-sia jika pemangku kepentingan lainnya tidak mendukung apa yang dijalankan pemerintah. Ingat bahwa dunia sedang darurat iklim dan dampaknya tidak dapat diatasi hanya dengan berdiskusi atau berwacana, melainkan butuh solusi nyata.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Riset Implementatif Lahirkan Solusi Inovatif

Teks CS. Purwowidhu

Fokus menekuni satu bidang tak jarang membuka pintu-pintu kesempatan menuju pencapaian yang berkesinambungan.

Setidaknya itu yang dirasakan oleh Adi Surya Pradipta, founder PT. Kanggo Nusantara Bagia atau lebih dikenal dengan brand Tech Prom Lab, perusahaan rintisan yang berfokus pada bidang teknologi material konstruksi dan pemanfaatan limbah industri. Sejak awal Adi memang sangat meminati bidang teknik material karena menurutnya ranah tersebut sangat implementatif. “Saya memang tertarik dengan penelitian ke arah produk karena lebih mudah diimplementasikan,” ungkap Adi. Di Indonesia sendiri pendidikan di bidang teknik material masih terbelang langka meski sebetulnya riset dari bidang tersebut dapat mendukung pengembangan industri. “Saat ini baru terdapat di ITB, UI, dan ITS (PTN). Sementara di luar negeri jurusan tersebut cukup signifikan karena ditujukan untuk pengembangan material-material baru atau sebagai pemasok untuk industri-industri yang dibutuhkan oleh negara-negara maju,” terangnya.

Dengan semangat mendalami bidang ini lebih lagi, Adi pun membulatkan tekad untuk melanjutkan studi, dan bukan tanpa alasan Adi menajutkan pilihannya pada universitas dalam

negeri. “Hasil penelitian dalam negeri lebih sesuai dengan kebutuhan dalam negeri,” imbuhnya. Beasiswa magister dari LPDP berhasil membawa Adi kembali menjejakkan kaki di Program Studi Ilmu dan Teknik Material Institut Teknologi Bandung (ITB).

Riset Implementatif

Selama menempuh perkuliahan di jenjang magister, Adi semakin jatuh cinta dengan riset dan karena ketekunannya Adi pun dipercaya oleh Kepala Laboratorium untuk menjadi salah satu asisten riset di Laboratorium Pemrosesan Material Maju ITB. Panjangnya waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sejumlah proyek penelitian bersama tim periset di kampusnya berhasil membawa Adi serta timnya mendapatkan dua grant dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Kompetisi Riset dan dua grant dari Kementerian Ristekdikti untuk program Inovasi Industri. Meski demikian, bagi Adi yang terpenting dalam sebuah riset adalah hasil riset tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat guna. “Signifikansi dari riset akan terlihat ketika hasil penelitian kita bisa dirasakan manfaatnya oleh khalayak,” tuturnya.

Lebih lanjut Adi memaparkan perbandingan implementasi penelitian di Indonesia dengan luar negeri. “Indonesia tidak kalah dari luar negeri dalam hal penelitian, yang menjadi

kendala di Indonesia yakni bagaimana membawa hasil riset itu untuk diimplementasikan ke industri atau ke konsumen/masyarakat,” ungkapnya. Adi yang berhasil lulus dengan predikat cum laude berpendapat, implementasi hasil riset berbasis material dalam negeri harus lebih digenjut supaya bisa langsung menjawab tantangan masa depan Indonesia. Prinsip riset yang implementatif teguh dipegang Adi dan menjadi cikal bakal dibangunnya Tech Prom Lab.

Dari Limbah Industri ke Startup Nondigital

Selepas kuliah, Adi melihat ada beberapa riset yang dikerjakannya semasa kuliah yang dapat dikembangkan. Ia lalu mengajak beberapa temannya untuk bergabung merintis jalan wirausaha. Berbeda dari startup pada umumnya yang berbasis digital, startup rintisan Adi ini cukup unik karena berbasis riset teknologi material. Merintis usaha bukanlah hal yang mudah, tetapi Adi bersama timnya tidak lelah mencoba segala upaya untuk menjalankan dan mengembangkan startup tersebut. “Saat ini perusahaan kami masih dalam tahap funding dan tractions,” katanya. Pada awal perjalanan, Adi serta ketiga temannya mengumpulkan dana pribadi untuk membiayai usaha mereka. Seiring berjalannya waktu, selain mendapat bantuan dana dari Ristekdikti (PPBT



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI



Adi Surya Pradipta, founder Tech Prom Lab

Foto Dok. Pribadi

dari dalam negeri maupun luar negeri pun diikuti. Hadiah yang diperoleh dari berbagai kompetisi tersebut dipakai sebagai tambahan dana untuk membangun Tech Prom Lab.

Bukan hanya asas manfaat yang diperhatikan Adi dan tim risetnya dalam berinovasi, tetapi juga asas pembangunan berkelanjutan, seperti produk pertama yang mereka hasilkan, yakni PoreBlock @ atau paving block (bata beton) berpori yang bahan bakunya memanfaatkan limbah industri batu bara sehingga menjadikannya sebagai produk yang ramah lingkungan. “Di satu sisi, limbah batu bara termasuk limbah berbahaya (B3) tetapi setelah diteliti lebih lanjut melalui uji toksisitas sesuai peraturan dan standar yang berlaku, produk kami sangat aman,” paparnya. Tidak hanya menjadi alternatif solusi pemanfaatan limbah industri batu bara yang kini menumpuk tidak terolah, PoreBlock memiliki kecepatan meneruskan air 100x lebih cepat dibandingkan paving block

konvensional dan mencapai 1000 liter/m²/menit. Oleh karena itu, paving block karya anak bangsa yang telah dipatenkan ini juga menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi risiko banjir. Di samping itu, peran PoreBlock dalam mendinginkan suhu perkotaan pun bisa diandalkan. “Air-air yang menempel pada permukaan dalam PoreBlock akan mengalami evaporasi sehingga meminimalisasi panas permukaan jalan,” ungkapnya. Sebagai bahan infrastruktur yang ramah lingkungan, produk inovasi teknologi material yang dihasilkan Tech Prom Lab ini tentunya cocok untuk diterapkan di Indonesia yang beriklim tropis. Rumah Sakit, sekolah, pabrik, toko-toko adalah sebagian dari pengguna produk startup besutan Adi. “Saat ini orderan berdatangan dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia Timur,” pungkasnya.

Ingat Janji Kontribusi

Semangat berkontribusi bagi lingkungan terus digalakkan Adi melalui

inovasi yang lahir dari riset-riset yang dijalankan olehnya dan tim. “Kita gak mau berhenti di PoreBlock saja. Sekarang kami sedang proses kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memberi kontribusi dalam proses pemanfaatan limbah lain seperti plastik, salah satu limbah yang sedang jadi permasalahan global,” tuturnya.

Adi yang semasa perkuliahan aktif sebagai Koordinator Awardee LPDP se-Bandung Raya dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun kelas inspirasi untuk masyarakat sekitar Bandung menekankan pentingnya manajemen waktu bagi para awardee yang masih menempuh perkuliahan. Ia juga mengharapkan semangat kontribusi dari para awardee LPDP tidak berkobar hanya semasa menempuh perkuliahan melainkan terus berlanjut sampai mereka kembali lagi ke masyarakat. “Semoga biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai beasiswa bisa memiliki investasi jangka panjang untuk kebaikan orang banyak di negeri ini,” harapnya.

ARTI TERSEMBUNYI KOREOGRAFI TARI CACI

Teks dan Foto Adhi Kurniawan



Labuan Bajo tak hanya menawarkan pesona Pulau Komodo dan Pulau Rinca kepada wisatawan yang datang. Sekitar satu jam berkendara dari pusat kota, kita akan sampai di Kampung Cecer di Desa Liang Ndara. Di desa ini kita bisa melihat pertunjukan Tari Caci.

Tarian perang lambang kegagahan

Tari Caci bermula dari tradisi masyarakat lokal di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dua orang pria dewasa ditampilkan sedang bertarung. Mereka saling menguji keberanian dan ketangkasan. Seiring waktu, kesenian ini berkembang menjadi pertunjukkan yang ditampilkan saat momen-momen penting dalam masyarakat setempat, misalnya syukuran musim panen (*hang woja*), ritual tahun baru (*penti*), serta berbagai upacara adat lainnya.

Sebelum memulai tarian, pemuka adat akan melakukan ritual pembuka dengan jamuan minum *sopi*, minuman tradisional setempat. Tak lama, para penari pun mulai bergerak ringan. Diiringi tabuhan, yel-yel dan lagu tradisional, mereka kemudian mulai

memasuki arena.

Dalam penampilan Tari Caci, para penari bertarung dengan berbekal cambuk dan perisai. Penari pertama disebut *paki* yang bertindak sebagai penyerang. Penari kedua berperan sebagai *ta'ang* atau penangkis. Dengan cambuk dari kulit kerbau atau sapi yang dikeringkan, *paki* akan berusaha sekuat tenaga menyerang lawannya. Tak boleh sembarangan, mereka hanya boleh menyerang bagian lengan, punggung, dan dada. Sementara itu, *ta'ang* harus bisa menangkis dan menghindari dari serangan sang penantang. Dia bertahan dengan perisai bundar berlapis kulit kerbau dan busur bambu berlilit rotan.

Dimainkan bergantian

Tari Caci dimainkan secara bergiliran antara dua kelompok. Setiap kubu mengirimkan satu orang dalam tiap babak. Tiap penari pun bergantian memainkan peran penyerang dan bertahan. Di sela-sela pertarungan mereka diberi minuman *sopi* untuk menambah semangat. Suasana menjadi semakin seru karena tiap kelompok memiliki suporter layaknya pertandingan bola. Mereka bersorak-sorai memberikan

dukungan agar jagoan mereka menang. Gendang dan gong jadi pengiring selama pertunjukkan. Lantunan lagu tradisional, seperti *nenngo* atau *dare*, terus dinyanyikan penonton untuk membakar semangat para penari.

Para penari Nampak gagah dengan kostum layaknya prajurit siap bertempur di medan laga. Mereka mengenakan penutup kepala berupa kain yang diikat dan topeng kayu menyerupai bentuk kepala sapi. Para penari ini bertelanjang dada, memperlihatkan otot yang kekar. Celana kain putih dan lilitan kain tenun khas Flores membungkus tubuh bagian bawah mereka. Sebagai pelengkap, mereka melengkapi penampilan dengan lonceng-lonceng kecil dan aksesoris menyerupai ekor sapi di bagian belakang tubuh.

Ajang cari jodoh

Di balik pertarungan yang seolah penuh dengan rivalitas, tarian ini menunjukkan sportivitas. Meski saling bertarung, setelah tarian selesai tidak boleh ada dendam di antara para pemain. Tak hanya itu, tarian ini menyimpan sisi romantisme tersendiri. Pada zaman dulu, kesenian ini menjadi ajang tebar pesona bagi para pemuda untuk memikat gadis-gadis di desanya. Dengan Tari Caci, mereka menunjukkan keberanian dan keperkasaan mereka. Para pemain akan bertarung habis-habisan untuk menarik perhatian gadis incaran mereka.

Fungsi pementasan tarian ini mungkin sudah bergeser dari awal penciptaannya. Tapi bukan berarti Tari Caci kehilangan daya tariknya untuk dapat kita apresiasi dan nikmati. Tertarik untuk mengunjungi Kampung Cecer dan menyaksikan Tari Caci? Jangan lupa masukkan destinasi ini ke dalam rencana liburan Anda berikutnya ke Labuhan Bajo!



Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

Marry with Your Bank

Dalam banyak kesempatan *sharing*, saya sering mengatakan bahwa memilih bank yang akan menjadi partner sama pentingnya dengan memilih pasangan. Lalu, bagaimana caranya? Mulailah dengan memilih satu bank yang cocok dengan profil keuanganmu. Gunakan semua produk bank tersebut, dari tabungan, deposito, kartu kredit, hingga KPR, dan produk apapun yang Anda butuhkan dan ditawarkan oleh bank tersebut sampai Anda menjadi nasabah prioritasnya.

Ada beberapa alasan mengapa penting memilih bank yang tepat buat Anda pribadi.

Pertama, *simplifying your bank account*.

Tujuannya jelas, supaya semua transaksi tercatat lebih rapi. Misalnya, berapa uang yang masuk ke rekening, kapan uang keluar masuk, dst. Ibarat perusahaan, kita ingin membuat keuangan pribadi kita lebih akuntabel sehingga lebih gampang untuk mengaudit sendiri, mengingat saat ini hampir semua transaksi kita jalankan secara *cashless*. Transaksi kartu kredit, dan lain-lain akan muncul semua di sini. Sangat mudah, tidak perlu lagi teknik amplop dan catat-mencatat.

Berikutnya, *less "ribet" means*

less cost. Kalau Anda setuju dengan pernyataan bahwa waktu adalah uang, maka beginilah seharusnya. Misalnya soal kartu kredit. Sedikit kartu kredit akan membuatmu menghemat biaya administrasi, materai, denda keterlambatan, dan banyak hal lain. Anda juga bisa mengajukan negosiasi bebas biaya tahunan jika *track record* kreditmu bagus. Kemudian, *get lots of privileges from your bank*. Setiap bank biasanya akan punya fasilitas yang berbeda-beda untuk nasabah prioritasnya, mulai dari *free airport lounge*, kemudahan menaikkan *limit*

kartu kredit, promo diskon belanja, dan banyak fasilitas yang lainnya.

Yang tak kalah penting adalah kemudahan mendapatkan kredit. Dengan memilih satu bank sebagai pasangan, otomatis histori transaksimu akan bagus di bank tersebut. Bank akan lebih mudah mempercayai histori transaksi daripada dokumen-dokumen yang Anda berikan. Bahkan Anda pun bisa mengajukan *nego rate* bunga kredit jika Anda adalah nasabah prioritasnya.

Yang terakhir yaitu memudahkan ahli waris. Ketika Anda memilih suatu bank, ada baiknya istri dan anak-anak Anda dibuatkan rekening di bank yang sama. Mengapa? Hal ini perlu agar akan lebih mudah mengawasi transaksi dan ketika terjadi resiko, ahli waris

Anda minimal sudah mengenal baik bank Anda untuk urusan administrasinya.

Bayangkan saja jika Anda menaruh uang di banyak bank, ketika Anda tiada, berapa banyak *paper work* yang harus diurus dan waktu yang dihabiskan oleh ahli waris Anda hanya untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka juga. Ini pun jika mereka mengetahui dimana saja Anda menyimpan uang Anda.

Mari evaluasi ulang semua kegiatan perbankan selama ini. Hal ini akan membantumu menentukan bank mana yang akan menjadi "pasangan" hidupmu.



Mas Praim

"TERLALU BANYAK BERANDAI"

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska





HARI RADIO SEDUNIA
13 FEBRUARI 2020

Foto
Anas Nur Huda
Resha Aditya P